

PERWIRA AKTIF TNI YANG MENEMPATI JABATAN SIPIL PADA KEMENTERIAN ATAU LEMBAGA NEGARA.



Letkol Inf
Teddy Indra
Wijaya



Laksamana
Pertama TNI
Ian Heriyawan



Mayjen TNI
Maryono



Mayjen TNI
Novi Helmy
Prasetya



Mayjen TNI
Irham Waroihan

FRIKSI TAJAM REVISI UU TNI

Dibahas Tertutup di Hotel, Prasangka Dwifungsi ABRI Kembali Menguat

Friksi sebenarnya sudah dimulai sejak usulan revisi Undang-undang (UU) Tentara Nasional Indonesia (TNI) muncul. Kritik meruncing karena dianggap tidak transparan dan minim partisipasi publik. Diketahui, pemerintah dan DPR saat ini tengah membahas Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang TNI. Pembahasan ini berlangsung di Hotel Fairmont Jakarta pada akhir pekan, 14-15 Maret 2025 secara tertutup. Koalisi Masyarakat Sipil untuk Reformasi Sektor Keamanan, yang terdiri dari 20 kelompok masyarakat sipil, menyatakan bahwa pembahasan RUU TNI berpotensi menghidupkan kembali dwifungsi ABRI. Salah satu perubahan yang disorot adalah ke depan prajurit aktif dapat menduduki jabatan di kementerian dan lembaga negara, termasuk kantor yang membidangi politik dan keamanan negara, pertahanan negara, sekretaris militer presiden, intelijen negara, sandi negara, Lembaga Ketahanan Nasional (Lemhannas), Dewan Pertahanan Nasional, Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan (SAR), Badan Narkotika Nasional (BNN), dan Mahkamah Agung. Padahal sebelumnya UU TNI mewajibkan mengundurkan diri atau pensiun dari dinas aktif. Kondisi makin memanas usai perwakilan dari KontraS mendatangi lokasi rapat dan menggedor pintu menyerukan agar pembahasan RUU tersebut ditolak. Buntutnya, Minggu (16/3/2025), kantor KontraS dikabarkan didatangi oleh 3 orang tidak dikenal (OTK) yang mencoba membobol masuk. Masalah makin meluas, karena di sisi lain anggota satuan pengamanan (satpam) Hotel Fairmont melaporkan tiga anggota KontraS ke Polda Metro Jaya dengan tuduhan mengganggu ketertiban umum dan melawan pejabat negara yang sedang bertugas.

Baca Hal 11....

KONTROVERSI RUU TNI

Tiga hal krusial yang bakal direvisi

1. Kedudukan anggota TNI sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 3.
2. Perpanjangan masa pensiun prajurit
3. TNI bisa masuk kementerian/lembaga.

16 Jabatan Sipil yang Diusulkan Bisa Diisi TNI Aktif

Tanpa Mengundurkan Diri

- | | |
|--|--|
| 1. Korbid Polkam | 9. Narkotika Nasional |
| 2. Pertahanan Negara | 10. Kelautan dan Perikanan |
| 3. Setmilpres | 11. BNPB |
| 4. Badan Intelijen Negara (BIN) | 12. BNPT |
| 5. Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN) | 13. Keamanan Laut |
| 6. Lemhannas | 14. Keajung |
| 7. Dewan Pertahanan Nasional (DPN) | 15. Mahkamah Agung |
| 8. SAR Nasional | 16. Badan Nasional Pengelola Perbatasan (BNPP) |

Berdasarkan aturan lama Pasal 47 ayat 2 dalam UU TNI yang berlaku saat ini hanya ada 10 kementerian lembaga yang bisa dijabat oleh TNI aktif.

Pasal 47

Prajurit hanya dapat menduduki jabatan sipil setelah mengundurkan diri atau pensiun dari dinas aktif keprajuritan.

Prajurit aktif dapat menduduki jabatan pada kantor yang membidangi koordinator bidang Politik dan Keamanan Negara, Pertahanan Negara, Sekretaris Militer Presiden, Intelijen Negara, Sandi Negara, Lembaga Ketahanan Nasional, Dewan Pertahanan Nasional, Search and Rescue (SAR) Nasional, Narkotika Nasional, dan Mahkamah Agung.

Jadi ada penambahan 6 jabatan sipil yang bisa dijabat prajurit TNI yakni

Kelautan dan Perikanan,
BNPB, BNPT, Keamanan Laut, BNPP dan Keajung.

**KEMBALIKAN TNI
KE BARAK!**

Prabowo Pimpin Ratas Percepatan Hilirisasi, Fokus Buka Lapangan Kerja

JAKARTA — Presiden Prabowo Subianto mengadakan rapat terbatas bersama sejumlah menteri Kabinet Merah Putih di Hambalang, Kabupaten Bogor, Jawa Barat untuk membahas percepatan hilirisasi nasional di berbagai sektor strategis, Minggu (16/3/2025).

Fokus utama rapat adalah memastikan proyek-proyek hilirisasi memberikan dampak nyata bagi penciptaan lapangan kerja serta pemerataan pertumbuhan ekonomi di seluruh wilayah Indonesia.

Sekretariat Kabinet mengatakan bahwa rapat juga menindaklanjuti keputusan Presiden mengenai implementasi 21 proyek hilirisasi prioritas, di mana Kepala Negara memberikan arahan agar proyek-proyek tersebut mengutamakan serapan tenaga kerja, mengombinasikan teknologi dengan padat karya, serta memprioritaskan industri substitusi impor.

"Presiden Prabowo juga menekankan pentingnya penyebaran investasi hilirisasi secara merata di seluruh wilayah Indonesia, tidak terpusat di satu pulau saja. Hal tersebut penting agar terjadi penyebaran ekonomi di seluruh Indonesia," mengutip keterangan resmi Sekretariat Kabinet, Minggu (16/3/2025).

Menteri Investasi dan Hilirisasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Rosan Roeslani menyampaikan bahwa pihaknya bersama kementerian terkait telah menginventarisasi sejumlah proyek hilirisasi di sektor mineral, batu bara, aquaculture, pertanian, hingga perkebunan. Analisis menyeluruh dilakukan untuk menentukan prioritas proyek-proyek yang mampu memberikan manfaat maksimal bagi perekonomian dan kesejahteraan masyarakat.

"Kita prioritaskan proyek-proyek mana saja yang memberikan dampak positif, terutama dalam bidang penciptaan lapangan pekerjaan. Itu adalah salah satu parameter utama yang tadi kami lihat," ujar Rosan usai rapat.

Rosan menambahkan, proyek hilirisasi juga dinilai dari kontribusinya dalam menurunkan impor, meningkatkan ekspor, dan memperkuat daya saing industri nasional. Rosan menekankan arahan Presiden Prabowo agar hilirisasi tidak berhenti pada tahap awal, melainkan menjadi pintu masuk bagi proses industrialisasi yang lebih luas.

"Arahan Bapak Presiden adalah



Presiden Prabowo Subianto memimpin rapat terbatas (ratas) bersama sejumlah menteri Kabinet Merah Putih di Hambalang, Kabupaten Bogor, Jawa Barat, Minggu (16/3/2025). (Setkap.Dok)

yang paling banyak menciptakan multiple-nya. Sehingga ini bisa menjadi industrialisasi, karena hilirisasi ini adalah bagian dari ujungnya industrialisasi ini," jelasnya.

Tidak hanya berorientasi ekonomi makro, proyek-proyek hilirisasi juga diarahkan untuk melibatkan para petani tambak, petani perkebunan, hingga masyarakat sekitar, agar

kesejahteraan mereka turut meningkat.

Sementara itu, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia menegaskan bahwa keseriusan Presiden dalam mendorong hilirisasi tercermin dari pelaksanaan rapat di hari Minggu. Bahlil juga menyampaikan apresiasi atas komitmen Presiden Prabowo dan jajaran kabinetnya.

"Ini adalah bentuk dari perhatian keseriusan Bapak Presiden dalam mengawal, mengecek program-program yang sudah diperintahkan kepada menteri-menterinya," ungkap Bahlil. (din, rls, ist/dya)

Imbas 60 Ribu Buruh di PHK, Pemerintah Diminta Bentuk Satgas



Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI), Said Iqbal

JAKARTA- Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) yang juga Presiden Partai Buruh Said Iqbal mengungkapkan saat ini terjadi gelombang pemutusan hubungan kerja (PHK) besar-besaran.

Berdasarkan data yang dihimpun oleh Partai Buruh dan KSPI, tercatat sedikitnya 60 ribu buruh telah mengalami PHK dari 50 perusahaan. Bahkan, hanya dalam dua bulan pertama 2025, jumlah buruh yang terkena PHK terus meningkat secara signifikan.

"Berbagai faktor menyebabkan PHK ini mulai dari perusahaan yang dinyatakan pailit, kebijakan efisiensi dan pengurangan karyawan, hingga relokasi pabrik ke negara lain seperti Tiongkok dan Jepang," ungkap Said,

Minggu (16/3/2025).

Ia menambahkan, berdasarkan data yang dihimpun berdasarkan laporan dari daerah KSPI dan Partai Buruh sepuluh Jawa, terdapat 37 perusahaan yang telah melakukan PHK tanpa kepastian untuk mendapatkan pesangon dan THR.

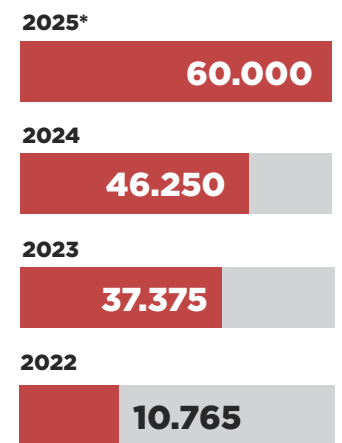
Termasuk laporan dari buruh Sritex yang mengadu ke Posko KSPI dan Partai Buruh di Su k o h a r j o yang

menyatakan puluhan ribu buruh Sritex bisa dipastikan tidak mendapatkan THR sampai dengan H-7 Lebaran.

Di sisi lain, ia menyebut masih terdapat data dari 13 perusahaan lainnya dengan jumlah buruh ter-PHK sekitar 16 ribu orang (Januari-Februari 2025) yang saat ini sedang diverifikasi ulang oleh Posko KSPI dan Partai Buruh Jawa Barat, Jawa Tengah, Banten, Jawa Timur, Kepulauan Riau, dan Sumatra Utara.

"Sektor industri yang mengalami PHK besar-besaran di 13 perusahaan lainnya tersebut meliputi sektor industri kelapa sawit, tekstil garmen sepatu, elektronik, industri jasa dan perdagangan (startup dan industri

TREN PHK MENINGKAT (2022-2025*)



(* Data Sementara)

retail seperti KFC), dan industri otomotif truk/dump truck," ungkap dia.

Terkait dengan hal ini, KSPI dan Partai Buruh mendesak Menteri Ketenagakerjaan untuk segera membentuk Satuan Tugas (Satgas) PHK guna menangani dan menyelesaikan permasalahan ini secara menyeluruh. Pemerintah tidak boleh hanya terfokus pada kasus Sritex, tetapi juga harus berlaku adil dengan menangani kasus PHK di berbagai perusahaan lain.

"Pemerintah tidak boleh diam. Kami menuntut Menteri Ketenagakerjaan segera membentuk Satgas PHK untuk mengawal penyelesaian kasus ini. Jangan hanya fokus pada Sritex, tetapi juga tangani kasus-kasus PHK lainnya secara menyeluruh," ujar Said. (wid, rls/dya)

Moratorium Pengiriman TKI ke Arab Saudi Bakal Dicabut DPR Minta Pemerintah Hati-hati

JAKARTA - Komisi IX DPR RI meminta pemerintah berhati-hati dalam mencabut moratorium pengiriman tenaga kerja Indonesia (TKI) atau pekerja migran Indonesia (PMI) ke Arab Saudi. Charles Honoris, Wakil Ketua Komisi IX, mengatakan pemerintah harus memastikan regulasi perlindungan pekerja migran di Arab Saudi kini lebih baik daripada sebelumnya.

"Pencabutan moratorium pengiriman Pekerja Migran Indonesia ke Arab Saudi harus dilakukan dengan sangat hati-hati," kata Charles lewat pesan singkat Minggu (16/3/2025).

Moratorium saat itu diberlakukan karena minimnya perlindungan hukum bagi PMI. Hal tersebut menyebabkan terjadinya berbagai kasus eksploitasi, kekerasan, hingga pelanggaran hak asasi manusia para pekerja migran.

Charles mendesak pemerintah untuk menjamin adanya kepastian upah yang layak, perlindungan asuransi kesehatan, serta asuransi kecelakaan kerja bagi PMI yang nantinya bekerja di Arab Saudi. Politikus Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) itu juga meminta kementerian selain Kementerian P2MI ikut terlibat.

Ia mengatakan Kementerian Luar Negeri melalui perwakilan di Arab Saudi perlu menyiapkan mekanisme pengaduan yang mudah diakses dan responsif. "Termasuk menyediakan shelter bagi PMI yang mengalami masalah," kata Charles.

Menurut Charles, Komisi IX akan terus mengawal perlindungan PMI, termasuk mereka yang di Arab Saudi, supaya pelanggaran hak di masa lalu tidak terulang. "Negara wajib hadir untuk melindungi pekerja migran, yang merupakan pahlawan devisa bagi Indonesia," ujarnya.

Direncanakan Mulai 20 Maret

Menteri Perlindungan Pekerja Migran Indonesia (P2MI), Abdul Kadir Karding, menjelaskan bahwa pencabutan moratorium akan



Menteri Perlindungan Pekerja Migran Indonesia (P2MI) Abdul Kadir Karding

dilakukan secara simbolis melalui penandatanganan nota kesepahaman (MoU) pada 20 Maret 2025.

"Pencabutan moratorium rencananya akan dilakukan Maret ini, insya Allah tanggal 20 jika tidak ada halangan," ujar Karding di Jakarta, Minggu (16/3/2025).

Moratorium PMI ke Arab Saudi sudah berlaku sejak 2015. Abdul berharap nota kesepahaman atau Memorandum of Understanding (MoU) antara pemerintah Indonesia dan Arab Saudi dilakukan paling lambat Maret 2025, sehingga pemberangkatan dapat dilakukan mulai Juni.

Abdul mengatakan Presiden Prabowo Subianto sudah menyetujui rencana pencabutan moratorium. Kementerianya saat ini sedang menyiapkan skema pelatihan dan penempatan PMI di Arab Saudi. Di tingkat bilateral, Abdul mengaku sudah berkomunikasi dengan Kementerian Tenaga Kerja Arab Saudi mengenai rencana penghapusan moratorium.

Arab Saudi, katanya, bersedia menjamin masing-masing akan mendapatkan upah 1.500 riyal atau 6,5 juta per bulan. "PMI juga akan diberikan asuransi kesehatan, asuransi jiwa, dan asuransi ketenagakerjaan," kata Abdul usai bertemu Presiden Prabowo Subianto

di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat, Jumat (14/3/2025).

Menurut Abdul, penghapusan moratorium ini merupakan upaya pemerintah melindungi PMI. Sebab, meski ada moratorium, selama ini ada sebanyak 25 ribu PMI yang dikirim secara non-prosedural ke Arab Saudi setiap tahunnya.

Setelah moratorium dicabut, pemerintah menargetkan pengiriman sebanyak 600.000 TKI ke Arab Saudi. Dari jumlah tersebut, 400.000 pekerja akan ditempatkan di sektor domestik, sementara 200.000 lainnya merupakan tenaga kerja terampil (skilled labour) yang memiliki keahlian khusus.

"Kita dapat kuota 600.000, 400.000 untuk domestik dan 200.000 untuk tenaga kerja terampil," jelas Karding.

Selain itu, pemerintah mengubah skema penempatan tenaga kerja. Jika sebelumnya 80 persen TKI bekerja di sektor domestik, kini jumlahnya dikurangi menjadi 60 persen. Langkah ini bertujuan untuk meningkatkan jumlah pekerja migran yang memiliki keterampilan di berbagai bidang.

Sebelumnya, pada Jumat (14/3/2025), Karding bertemu dengan Presiden Prabowo Subianto untuk melaporkan rencana pencabutan moratorium. Dalam

pertemuan tersebut, Presiden mendukung langkah ini dan meminta Kementerian BP2MI menyiapkan skema pelatihan serta pengiriman tenaga kerja.

"Beliau meminta agar semua persiapan dilakukan dengan matang, termasuk skema pelatihan," ungkap Karding.

Selain itu, pemerintah menargetkan peningkatan jumlah pekerja migran yang dikirim ke berbagai negara pada 2026 menjadi 425.000 orang. Dengan peningkatan ini, remitansi atau devisa yang dikirim para pekerja ke Indonesia diperkirakan mencapai Rp 439 triliun. Dengan pencabutan moratorium ini, pemerintah berharap dapat meningkatkan kesejahteraan pekerja migran serta memperkuat kontribusi mereka terhadap perekonomian nasional. Namun, pengawasan tetap akan dilakukan untuk memastikan perlindungan bagi para TKI yang bekerja di luar negeri.

Salah satu bentuk perlindungan lainnya adalah menetapkan gaji minimal. Bagi pekerja migran Indonesia yang nantinya dikirim ke Arab Saudi akan mendapat gaji minimal 1.500 Riyal atau sekitar Rp 6,45 juta (kurs Rp 4.300).

"Perlindungan mereka jauh lebih baik sekarang, lebih maju. Misalnya, mereka itu menjamin minimal gaji di angka 1.500 Riyal," sebut Karding.

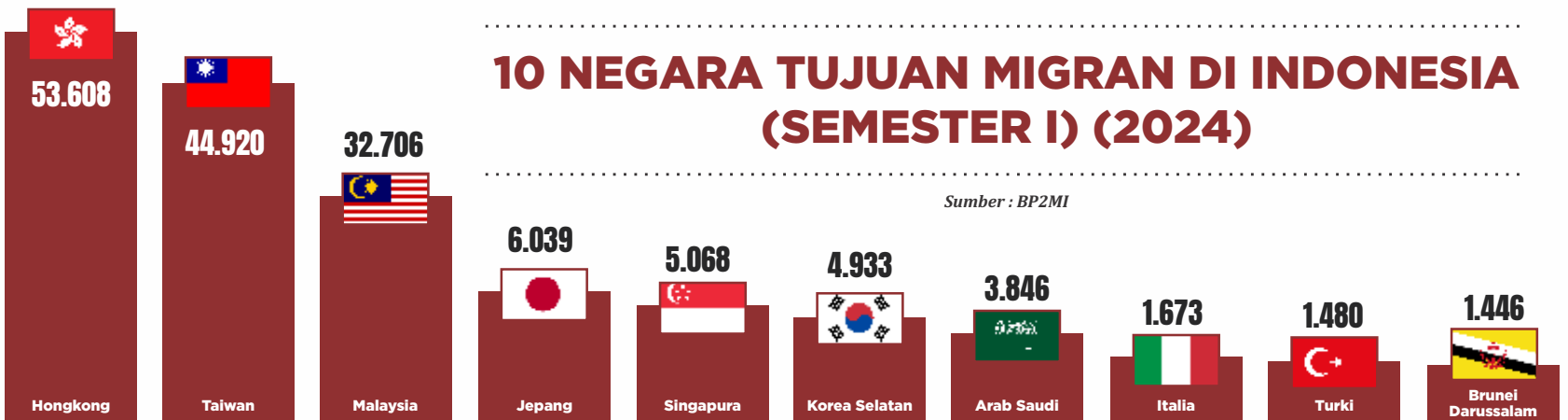
Lalu, ada juga perlindungan dalam konteks asuransi kesehatan, asuransi jiwa, dan asuransi ketenagakerjaan. Pihak Arab Saudi juga akan melakukan integrasi data.

Selain itu, Karding juga mengatakan beberapa penyedia kerja juga menjanjikan adanya bonus bagi pekerja migran Indonesia. Bonus itu berupa perjalanan umrah gratis.

"Yang menarik lagi bahwa setiap selesai kontrak dua tahun untuk orang Indonesia dikasih bonus umrah sekali," sebut Karding. (wid, rls, ant kum/dya)

10 NEGARA TUJUAN MIGRAN DI INDONESIA (SEMESTER I) (2024)

Sumber : BP2MI



OTT KPK di OKU Sumsel: DPRD Diungkap Minta Jatah Pokir Rp 40 M agar RAPBD Disahkan

JAKARTA - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengungkap anggota DPRD di Kabupaten Ogan Komering Ulu (OKU), Sumatera Selatan (Sumsel), yang ditetapkan sebagai tersangka kasus suap meminta jatah pokir Rp 40 miliar dari proyek di Dinas PUPR. Permintaan jatah itu dilakukan saat adanya pembahasan RAPBD OKU pada Januari 2025.

Ketua KPK Setyo Budiyanto mengatakan perwakilan DPRD menemui pihak Pemkab OKU agar RAPBD itu dapat disahkan. Dalam pertemuan itulah perwakilan DPRD diduga meminta jatah pokir.

"Pada pembahasan tersebut, perwakilan dari DPRD meminta jatah pokir, seperti yang diduga sudah dilakukan. Kemudian, disepakati bahwa jatah pokir tersebut diubah menjadi proyek fisik di Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan sebesar Rp 40 miliar," kata dalam konferensi pers di gedung KPK, Kuningan, Jakarta Selatan, Minggu (16/3/2025).

Dia mengatakan proyek untuk pikir ketua dan wakil ketua DPRD senilai Rp 5 miliar. Sementara nilai

untuk anggota DPRD Rp 1 miliar.

"Jadi ini adalah perubahan, untuk bisa mengubah RAPBD yang ada di Kabupaten OKU," ujar Setyo.

Namun nilai pokir turun menjadi Rp 35 miliar karena ada keterbatasan anggaran. Sementara fee bagi anggota DPRD tetap 20 persen dari proyek yang ada di Dinas PUPR.

Singkat cerita, disetujui APBD tahun anggaran 2025 dengan anggaran Dinas PUPR naik menjadi Rp 96 miliar dari Rp 48 miliar. Kadis PUPR OKU Nopriansyah (NOP) pun bergerak menawarkan sembilan proyek kepada pihak swasta dengan commitment fee 20 persen kepada anggota DPRD dan 2 persen kepada Dinas PUPR.

"Saat itu Saudara NOP yang merupakan Pejabat Kepala Dinas PUPR menawarkan 9 proyek tersebut kepada Saudara MFZ (M Fauzi) dan Saudara ASS (Ahmad Sugeng Santoso) dengan commitment fee sebesar 22 persen, yaitu 2 persen untuk Dinas PUPR dan 20 persen untuk DPRD," ucapnya.

KPK mengatakan Nopriansyah mengondisikan pemenangan proyek itu. Total ada sembilan proyek yang telah diatur oleh Nopriansyah dengan



KPK menampilkan 6 orang sebagai tersangka dalam operasi tangkap tangan (OTT) di Ogan Komering Ulu, Sumsel di Gedung KPK, Minggu (16/3/2025). (ist)

modus pinjam bendera.

Menjelang Idul Fitri, pihak DPRD yang diwakili oleh Ferlan, Fahrudin, dan Umimenagih jatah proyek tersebut ke Nopriansyah. Pada 13 Maret 2025, Fauzi menyerahkan uang kepada Nopriansyah sebesar Rp 2,2 miliar yang merupakan bagian fee proyek.

Selain itu, Setyo mengatakan Nopriansyah telah menerima uang Rp 1,5 miliar dari Ahmad lebih dulu. KPK pun menangkap Nopriansyah dkk pada

15 Maret 2025.

Akibat perbuatannya, Ferlan, Fahrudin, Umi, dan Nopriansyah dijerat Pasal 12 a atau 12 b dan 12 f dan 12 B UU Pemberantasan Tipikor juncto Pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP. Pasal 12 a dan b itu mengatur hukuman terkait suap, Pasal 12 f mengatur soal pemotongan anggaran dan Pasal 12 B tentang gratifikasi dengan hukuman maksimal 20 tahun penjara. (wid, rls, ist/dya)

66 Distributor dan Pengecer Minyak Kita Nakal Disanksi



Produsen Minyak Kita di Rajeg Kabupaten Tangerang di segel Polda Banten. Ist

sebanyak 66 pelaku usaha di tingkat distributor dan pengecer terbukti melanggar aturan dan telah dikenai sanksi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan," kata Moga dalam keterangan resminya, Minggu (16/3/2025).

Adapun, pengawasan terus digencarkan pada distribusi minyak goreng Minyak Kita untuk menjaga

stabilitas pasokan dan harga, terutama saat Ramadan dan menjelang Idulfitri 2025.

Dalam kasus ini, Moga menerangkan sejumlah modus pelanggaran yang ditemukan antara lain penjualan Minyak Kita di atas domestic price obligation (DPO) dan harga eceran tertinggi (HET).

"Selain itu juga penjualan Minyak Kita antar-pengecer, bukan langsung ke konsumen akhir, yang memperpanjang rantai distribusi sehingga harga di tingkat konsumen

melebihi HET, serta tidak adanya pembatasan penjualan oleh pengecer yang menyebabkan distribusi Minyak Kita tidak merata," ujarnya.

Tak hanya itu, modus oknum lainnya yaitu tidak memiliki tanda daftar gudang (TDG) dan Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI) perdagangan yang sesuai. Bahkan, ada pelaku usaha yang tidak memberikan data dan informasi kepada petugas pengawas.

Di sisi lain, terdapat pelaku usaha yang mengemas atau memproduksi Minyak Kita dengan volume yang lebih sedikit dari takaran yang tertera pada label kemasan.

Lebih lanjut, dia menegaskan, apabila ditemukan kembali melanggar, maka sesuai Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 29 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Perdagangan dan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 18 Tahun 2024 tentang Minyak Goreng Sawit Kemasan dan Tata Kelola Minyak Goreng Rakyat, produsen/repacker yang melakukan pelanggaran dikenakan sanksi lanjutan setelah teguran tertulis, berupa penarikan barang dari distribusi.

Adapun, apabila oknum masih terus melanggar, sanksi dapat ditingkatkan menjadi penghentian

sementara kegiatan usaha, penutupan gudang, dan/atau rekomendasi pencabutan izin usaha.

Sementara itu, berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, pelaku usaha wajib memproduksi dan/atau memperdagangkan barang sesuai dengan berat bersih, ukuran, atau takaran yang tercantum dalam label. Jika melanggar ketentuan tersebut, mereka dapat dipidana dengan hukuman penjara maksimal lima tahun atau denda hingga Rp2 miliar.

Lebih lanjut, Moga berujar, Kemendag melalui Direktorat Metrologi dan Unit Metrologi Legal di Kabupaten/Kota juga telah melakukan pengawasan terhadap produk yang sudah beredar di pasaran (post market) dengan memeriksa 88 produsen/pengemas ulang (repacker) di 168 kabupaten/kota.

Dari hasil pengawasan tersebut, sebanyak 40 produsen/repacker yang volume produknya tidak sesuai dengan label kemasan akan dikenai sanksi administratif dan diwajibkan segera melakukan perbaikan dengan pemantauan dari pemerintah daerah untuk mencegah kelangkaan. (din, rls, ant/dya)

Mudik 2025: Tol Probolinggo-Banyuwangi Dibuka Fungsional Gratis

Jalan Tol Probolinggo – Banyuwangi (Probowangi). (IG@pupr_bpjt)



JAKARTA-Kementerian Pekerjaan Umum (PU) melalui Badan Pengelola Jalan Tol (BPJT) akan mengoperasikan Jalan Tol Probolinggo – Banyuwangi (Probowangi) secara fungsional pada saat mudik Lebaran 2025.

Melalui Instagram resmi BPJT Kementerian PU, pengoperasian Jalan Tol Probowangi secara fungsional

ditujukan agar bisa mendukung kelancaran lalu lintas pada saat arus mudik dan arus balik Lebaran 2025.

Adapun tarif yang dikenakan masih gratis. Nantinya pada arus mudik 24 Maret sampai 31 Maret Jalan Tol Probowangi akan dibuka untuk satu arah menuju Gerbang Tol (GT) Kraksaan dan Paiton. Lalu pada arus

balik 1 April sampai 8 April akan dibuka sebaliknya.

"Pada saat arus mudik akan dibuka tanggal 24 sampai 31 Maret 2025 satu arah menuju GT Kraksaan dan Paiton. Sedangkan pada arus balik pada tanggal 1 sampai 8 April 2025 satu arah dari JT Paiton dan Kraksaan," tulis Humas BPJT dikutip dari Instagram, Minggu (16/3/2025).

BPJT Memastikan, pengoperasian sesuai dengan diskresi dari kepolisian dan khusus untuk kendaraan kecil (non bus) dari pukul 06.00 sampai 16.00 WIB.

Sebelumnya, Menteri Pekerjaan Umum (PU), Dody Hanggodo menyampaikan bahwa Jalan Tol Probowangi segmen Gending-Paiton menjadi salah satu ruas tol yang akan dioperasikan secara fungsional oleh Kementerian PU pada momen Lebaran 2025. Namun, menurut dia beberapa waktu lalu sempat terdapat longsor di ruas tol tersebut, tepatnya di ruas Kraksaan-Paiton. Sehingga kini ruas

Tol Gending-Paiton sedang dipersiapkan kondisinya agar bisa dilintasi pemudik.(wid,rls,ant/dya)

CATAT JADWALNYA

- **Mudik:** Untuk tanggal pengoperasian fungsional ruas Tol Probowangi, pada saat arus mudik akan dibuka pada tanggal 24-31 Maret 2025 untuk satu arah menuju Gerbang Tol (GT) Kraksaan dan Paiton.
- **Balik:** Sedangkan saat arus balik pada tanggal 1-8 April 2025 untuk satu arah dari GT Paiton dan Kraksaan.

KPK Ungkap RK di Rumah saat Digeledah

JAKARTA - KPK mengungkap posisi mantan Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil (RK) saat rumahnya digeledah terkait kasus dugaan korupsi pengadaan iklan di Bank Pembangunan Daerah Jabar dan Banten (Bank BJB). KPK mengatakan RK berada di kediamannya saat pengeledahan berlangsung.

"Dari informasi teman-teman yang ada di sana, itu beliau (RK) ada dan kooperatif," ujar Dirdik KPK Asep Guntur kepada wartawan di gedung KPK, Jakarta Selatan, Minggu (16/3/2025).

Asep mengatakan RK akan dikonfirmasi terkait dokumen dan barang bukti elektronik yang disita saat pengeledahan. Namun, untuk saat ini KPK masih harus mendalami sejumlah dokumen yang disita terlebih dahulu.

"Jadi begini, karena kita juga harus mendalami dokumen-dokumen yang kita kemarin hasil sita, kemudian barang bukti elektronik, itu harus kita pelajari dulu. Sehingga kita tau informasi apa yang akan ditanyakan, atau akan digali pada pak RK," ucapnya.

KPK sebelumnya mengatakan rumah Ridwan Kamil menjadi lokasi pertama yang digeledah terkait kasus dugaan korupsi pengadaan iklan di Bank BJB. KPK mengungkapkan alasan kenapa rumah RK menjadi lokasi pertamanya yang digeledah.

"Kami KPK dalam melaksanakan

upaya paksa pengeledahan tentunya ada petunjuk-petunjuk sebelumnya yang telah kita dapatkan. Sehingga, kami melakukan pengeledahan terhadap beberapa tempat," kata Plh Direktur Penyidikan KPK Budi Sokmo Wibowo dalam konferensi pers di gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Kamis (13/3/2025).

Budi menjelaskan, rumah RK merupakan prioritas utama penyidik untuk mencari petunjuk dalam perkara yang tengah diusut. Budi adalah Kasatgas yang menangani perkara ini di KPK.

"Satu keputusan saya selaku Kasatgas yang menangani perkara tersebut. Siapa yang prioritas pertama saya geledah adalah memang rumahnya saudara RK," kata dia.

"Karena mungkin itu adalah hal yang terpenting yang akan kami lakukan pertama kali," tambahnya.

Petinggi Golkar Telponan

Kondisi mantan Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil saat ini dalam keadaan baik. Hal ini dikonfirmasi oleh Sekretaris DPD Golkar Jawa Barat, MQ Iswara.

Pihaknya mengatakan bahwa saat ini Ridwan Kamil berada di Bandung dalam keadaan baik. Dalam percakapannya, Ridwan Kamil menegaskan bahwa dirinya tidak terlibat dalam kasus dugaan korupsi di Bank BJB yang tengah diselidiki oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

"Alhamdulillah, kami sudah berhasil berkomunikasi dengan Pak Ridwan Kamil. Semalam, beliau menghubungi saya melalui ponsel stafnya. Sebelumnya, saya memang sempat menyampaikan bahwa kami belum bisa berkomunikasi dengannya. Namun, sekitar pukul 22.00 WIB tadi malam, kami akhirnya berbicara," ungkap Iswara di Tasikmalaya, Minggu (16/3/2025).

Dalam percakapan melalui sambungan telepon tersebut, Iswara mengungkapkan beberapa poin utama yang disampaikan oleh pria yang akrab disapa Kang Emil itu.

"Pertama, Kang Emil menyatakan bahwa saat ini beliau berada di Bandung dan dalam kondisi baik," ujarnya.

Selain itu, Ridwan Kamil juga menegaskan komitmennya untuk menghormati dan mengikuti proses hukum yang berlaku.

"Beliau menegaskan kesiapannya untuk bersikap kooperatif dan memenuhi apa pun yang diminta oleh penyidik KPK," tambah Iswara.

Ia menambahkan, Ridwan Kamil menyadari konsekuensi sebagai seorang Gubernur atas apa yang



Mantan Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil (RK)

terjadi di bawahannya. Meski demikian Ridwan Kamil mengaku tidak terkait dalam perkara korupsi yang merugikan negara ratusan miliar rupiah itu.

"Kang Emil juga menyampaikan bahwa sebagai Gubernur saat itu, jika ada permasalahan di bawah, tentunya sudah sebuah konsekuensi, sebagai sebuah risiko jabatan, untuk memberikan informasi," kata Iswara.

"Tapi beliau menegaskan bahwa InshaAllah beliau tidak terkait dengan hal tersebut. Itu saya mengutip apa yang disampaikan, itu adalah kalimat yang disampaikan Ridwan Kamil," kata Iswara.(wid,rls/dya)

Ditutup Sejak 2023,

Pemkot Batu Pertimbangkan Buka Kembali TPA Tlekung



Wakil Wali Kota Batu saat meninjau TPA Tlekung. (dok. Prokopim Kota Batu)

MALANG - Pemerintah Kota (Pemkot) Batu tengah mengkaji kemungkinan pembukaan kembali Tempat Pemrosesan Akhir (TPA) Tlekung di Desa Tlekung, Kecamatan Junrejo, yang telah ditutup sejak 30 Agustus 2023. Wali Kota Batu, Nurochman, menegaskan rencana ini masih dalam tahap perencanaan awal dan akan sangat bergantung pada kesiapan infrastruktur pengolahan sampah.

Dalam rancangan awal Rencana

Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) 2025-2030, Wali Kota Batu mengungkapkan salah satu langkah krusial sebelum pengoperasian kembali TPA Tlekung adalah pemenuhan fasilitas pendukung, seperti mesin incinerator (mesin pembakar sampah) dan komposter untuk pengolahan sampah organik.

"Untuk mewujudkan industri pengolahan sampah yang efektif, infrastruktur harus dipersiapkan dengan matang. Untuk ini memang membutuhkan proses yang panjang, mulai dari penyusunan detail engineering design (DED), perhitungan kebutuhan anggaran, sampai dengan teknis pelaksanaannya. Mohon doanya," ujar Nurochman, Minggu (16/3/2025).

Ia menekankan, tanpa kesiapan infrastruktur yang memadai,

pembukaan kembali TPA Tlekung belum bisa direalisasikan. "Kami masih mempertimbangkan target pembukaannya, karena perlu memastikan semua elemen pendukung siap. Nanti kalau semuanya sudah siap, baru TPA akan bisa kembali menerima sampah dari luar," tegasnya.

Selain kesiapan infrastruktur, Pemkot Batu juga tengah mengencarkan pentingnya pengelolaan sampah berbasis kolaborasi antara pemerintah dan masyarakat. Pria yang akrab dengan sapaan Cak Nur ini menekankan, upaya pengolahan sampah tidak bisa hanya dibebankan kepada pemerintah daerah, tetapi harus melibatkan berbagai pihak, termasuk kepala desa dan lurah.

"Mulai dari proses pemilahan sampah itu sebaiknya dimulai dari tingkat desa. Masyarakat memiliki peran kunci dalam menciptakan solusi yang lebih efektif," katanya.

Untuk itu, Cak Nur juga berencana menggelar pertemuan dengan para kepala desa guna merumuskan langkah-langkah strategis dalam pengelolaan sampah. "Kami akan

mencari waktu yang tepat, mungkin dalam suasana santai atau setelah acara buka bersama, agar bisa berdiskusi lebih leluasa," tambahnya.

Lebih lanjut, meskipun ada rencana membuka kembali TPA Tlekung, Pemkot Batu memastikan operasional tempat pengolahan sampah reduce, reuse, dan recycle (TPS3R) tetap berjalan. Pasalnya saat ini, mayoritas sampah di Kota Batu diolah di masing-masing TPS3R, bukan ke TPA Tlekung. Dengan demikian, setiap desa dan kelurahan tetap bertanggung jawab atas pengolahan sampahnya masing-masing.

Sebagai informasi, saat ini Kota Batu memiliki 5 unit mesin insinerator, tiga di antaranya difungsikan di TPA Tlekung dengan kapasitas pembakaran 15 ton sampah per hari. Selain itu, dua unit lainnya tersebar di TPS3R Dadaprejo, Kecamatan Junrejo, dan TPS3R Kelurahan Sisir, Kecamatan Batu.

Jika TPA Tlekung kembali beroperasi, maka fasilitas ini dapat mendukung pengelolaan sampah yang lebih efektif dan berkelanjutan. (Santi/Dya)

Ada Dugaan Kebocoran PAD, DPRD Kota Malang Desak Evaluasi Tata Kelola Parkir

MALANG - DPRD Kota Malang menyoroti pengelolaan parkir di Kota Malang yang dinilai masih belum optimal. Banyaknya titik parkir, baik resmi maupun liar, tidak berbanding lurus dengan Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang dihasilkan. Dugaan adanya kebocoran retribusi parkir pun mencuat, mendorong legislatif untuk meminta evaluasi menyeluruh terhadap tata kelola parkir.

Anggota Fraksi NasDem-PSI DPRD Kota Malang, Donny Victorius, juga mempertanyakan efektivitas Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) Pengelolaan dan Penyelenggaraan Perparkiran yang tengah dibahas.

"Kami melihat ada ketidakseimbangan antara banyaknya titik parkir dengan realisasi penerimaan PAD. Ada dugaan kebocoran yang perlu segera ditindaklanjuti, terutama dalam konteks pengawasan dan sistem pembayaran retribusi," ujar Donny, Minggu (16/3/2025).

Donny menyampaikan, berdasarkan pada hasil kajian sejumlah perguruan tinggi di Kota Malang, potensi penerimaan dari retribusi parkir sebenarnya dapat

mencapai dua hingga tiga kali lipat dari target yang ditetapkan pemerintah setiap tahunnya. Namun, menurutnya data menunjukkan realisasi penerimaan selalu jauh di bawah ekspektasi.

Pada tahun 2024, Donny menyebutkan realisasi retribusi parkir tercatat mencapai Rp 10,9 miliar, mengalami kenaikan Rp 1,5 miliar dibandingkan tahun 2023. Meski meningkat, angka tersebut masih jauh dari target yang ditetapkan sebesar Rp 17 miliar. Bahkan pada tahun sebelumnya, capaian retribusi juga tidak mampu memenuhi target.

"Itu kajian akademik, loh. Artinya, potensi PAD dari parkir seharusnya bisa dua hingga tiga kali lipat dari target tahunan. Ini menunjukkan ada permasalahan serius dalam tata kelola parkir kita," tegas Donny.

Dengan masih rendahnya realisasi retribusi parkir, pihaknya meminta agar perangkat daerah terkait, terutama Dinas Perhubungan (Dishub), dapat memberikan penjelasan lebih rinci terkait Ranperda Pengelolaan dan Penyelenggaraan Perparkiran.

Menurut Donny, aturan yang

sedang disusun saat ini harus mampu menjawab permasalahan utama, yakni kebocoran retribusi dan efektivitas pengawasan.

"Ranperda ini harus bisa mengakomodasi opti-malisasi penerimaan retribusi parkir, bukan sekadar aturan administratif yang tidak berdampak pada peningkatan PAD," katanya.

Salah satu aspek yang menjadi sorotan adalah mekanisme pengelolaan karcis parkir. Menurutnya, karcis seharusnya dapat menjadi bukti resmi pembayaran dan alat kontrol bagi pemerintah. Namun, di banyak lokasi, juru parkir (jukir) kerap tidak memberikan karcis kepada pengguna jasa parkir.

"Di lapangan, mayoritas jukir di Kota Malang masih jarang memberikan karcis. Ini membuka celah kebocoran retribusi, karena berpotensi ada setoran yang tidak masuk ke kas daerah," imbuh Donny.

Sebagai solusi, DPRD Kota Malang



Ilustrasi karcis parkir di Kota Malang yang masuk dalam pendapatan retribusi daerah. (Santi/Lenteratoday)

mendukung penerapan sistem pembayaran elektronik untuk parkir. Sistem ini diharapkan dapat memperkecil celah kebocoran dan meningkatkan transparansi pendapatan dari sektor parkir.

Donny menilai, inovasi digital semacam ini tidak cukup hanya diterapkan pada setoran dari jukir ke Dishub, tetapi harus langsung dari pengguna jasa parkir ke kas daerah. (Santi/Dya)

Trump Serang Houthi di Yaman, 31 Orang Tewas

WASHINGTON - Presiden AS Donald Trump melancarkan serangan militer terbesar terhadap Houthi Yaman yang bersekutu dengan Iran pada hari Sabtu (15/3/2025).

Serangan kelompok di Laut Merah, menewaskan sedikitnya 31 orang pada awal kampanye yang diperkirakan akan berlangsung beberapa hari.

Trump juga memperingatkan Iran, pendukung utama Houthi, bahwa negara itu perlu segera menghentikan dukungannya terhadap kelompok itu. Ia mengatakan jika Iran mengancam Amerika Serikat, "Amerika akan meminta pertanggungjawaban penuh kepada Anda dan kami tidak akan bersikap baik!"

Panglima Tertinggi Garda Revolusi Iran bereaksi pada hari Minggu dengan mengatakan bahwa Houthi adalah kelompok independen dan mengambil keputusan strategis dan operasional mereka sendiri.

"Kami memperingatkan musuh-musuh kami bahwa Iran akan menanggapi dengan tegas dan destruktif jika mereka melakukan ancaman," kata Hossein Salami kepada media pemerintah.

Serangan yang sedang berlangsung - yang menurut seorang pejabat AS kepada Reuters mungkin akan berlangsung selama berminggu-minggu - merupakan operasi militer AS terbesar di Timur Tengah sejak Trump menjabat pada bulan Januari. Serangan itu terjadi saat Amerika Serikat meningkatkan tekanan sanksi terhadap Teheran sambil mencoba membawanya ke meja perundingan mengenai program nuklirnya.

"Kepada semua teroris Houthi, WAKTU KALIAN SUDAH HABIS, DAN SERANGAN KALIAN HARUS DIHENTIKAN, MULAI HARI INI. JIKA TIDAK, NERAKA AKAN MENGHUJAN KALIAN DENGAN HAL YANG BELUM PERNAH KALIAN LIHAT SEBELUMNYA!" Trump memposting di platform Truth Social miliknya.



Sebuah kapal menembakkan rudal ke lokasi yang dirahasiakan, setelah Presiden AS Donald Trump melancarkan serangan militer terhadap Houthi Yaman yang bersekutu dengan Iran pada hari Sabtu atas serangan kelompok tersebut terhadap pengiriman di Laut Merah, dalam tangkapan layar yang diperoleh dari video sebaran yang dirilis pada, Sabtu (15/3/2025). (Reuters)

Setidaknya 31 orang tewas dan 101 lainnya terluka akibat serangan AS, sebagian besar adalah wanita dan anak-anak, kata Anees al-Asbahi, juru bicara kementerian kesehatan yang dikelola Houthi dalam jumlah korban terbaru pada hari Minggu (16/3/2025).

Biro politik Houthi menggambarkan serangan itu sebagai "kejahatan perang."

"Angkatan bersenjata Yaman kami sepenuhnya siap untuk menanggapi eskalasi dengan eskalasi," katanya dalam sebuah pernyataan.

Penduduk di Sanaa mengatakan serangan itu menghantam sebuah bangunan di benteng Houthi.

"Ledakan itu dahsyat dan mengguncang lingkungan sekitar seperti gempa bumi. Wanita dan anak-anak kami ketakutan," kata salah seorang warga, yang mengaku bernama Abdullah Yahia, kepada Reuters.

Serangan juga menargetkan lokasi militer Houthi di kota Taiz di barat daya Yaman, kata dua saksi di daerah itu pada hari Minggu (16/3/2025).

Serangan lain terhadap pembangkit listrik di kota Dahyan di Saada menyebabkan pemadaman listrik, demikian dilaporkan TV Al-Masirah pada Minggu pagi. Dahyan adalah tempat Abdul Malik al-Houthi, pemimpin Houthi yang misterius, sering bertemu dengan para tamunya.

Houthi, gerakan bersenjata yang menguasai sebagian besar Yaman selama dekade terakhir, telah melancarkan sejumlah serangan terhadap kapal-kapal di lepas pantainya sejak November 2023, mengganggu perdagangan global dan membuat militer AS melakukan

kampanye mahal untuk mencegah rudal dan drone yang telah membakar persediaan pertahanan udara AS.

Seorang juru bicara Pentagon mengatakan Houthi telah menyerang kapal perang AS sebanyak 174 kali dan kapal komersial sebanyak 145 kali sejak 2023. Houthi mengatakan serangan itu merupakan bentuk solidaritas dengan Palestina atas perang Israel di Gaza dengan militan Hamas.

Pemerintahan AS sebelumnya di bawah Presiden Joe Biden telah berupaya melemahkan kemampuan Houthi untuk menyerang kapal-kapal di lepas pantainya tetapi membatasi tindakan AS tersebut.

Iran Murka

Komando Pusat militer AS, yang mengawasi pasukan di Timur Tengah, menggambarkan serangan hari Sabtu (15/3/2025) sebagai awal operasi skala besar di seluruh Yaman.

Serangan pada hari Sabtu (15/3/2025) dilakukan sebagian oleh pesawat tempur dari kapal induk Harry S. Truman, yang berada di Laut Merah, kata para pejabat.

"Serangan Houthi terhadap kapal & pesawat Amerika (dan pasukan kita!) tidak akan ditoleransi; dan Iran, dermawan mereka, sedang diberi tahu," tulis Menteri Pertahanan Pete Hegseth di X.

Kementerian luar negeri Iran mengutuk serangan terhadap Yaman sebagai "pelanggaran berat terhadap prinsip-prinsip Piagam Perserikatan Bangsa-Bangsa dan aturan dasar hukum internasional", dalam sebuah pernyataan yang dibagikan oleh media pemerintah.

Menteri Luar Negeri Iran Abbas Araqchi mengatakan pemerintah AS "tidak memiliki wewenang, atau urusan, yang mendikte kebijakan luar negeri Iran."

"Akhir dukungannya terhadap genosida dan terorisme Israel.

Hentikan pembunuhan terhadap warga Yaman," katanya dalam posting X pada Minggu (16/3/2025) dini hari.

Pada hari Selasa, Houthi mengatakan mereka akan melanjutkan serangan terhadap kapal-kapal Israel yang melewati Laut Merah dan Laut Arab, Selat Bab al-Mandab dan Teluk Aden, mengakhiri periode relatif tenang yang dimulai pada bulan Januari dengan gencatan senjata Gaza.

Serangan AS itu terjadi beberapa hari setelah Trump mengirim surat kepada Pemimpin Tertinggi Iran Ayatollah Ali Khamenei, yang isinya meminta diadakannya pembicaraan mengenai program nuklir Iran.

Khamenei pada hari Rabu menolak mengadakan negosiasi dengan Amerika Serikat.

Meski begitu, Teheran semakin khawatir bahwa meningkatnya kemarahan publik terhadap kesulitan ekonomi dapat meletus menjadi protes massa, kata empat pejabat Iran kepada Reuters.

Tahun lalu, serangan Israel terhadap fasilitas Iran, termasuk pabrik rudal dan pertahanan udara, sebagai balasan atas serangan rudal dan pesawat tak berawak Iran, mengurangi kemampuan militer konvensional Teheran, menurut pejabat AS.

Iran telah membantah keinginannya untuk mengembangkan senjata nuklir. Namun, lembaga pengawas nuklir PBB telah memperingatkan bahwa Iran secara drastis mempercepat pengayaan uranium hingga mencapai kemurnian 60%, mendekati tingkat kemurnian senjata sekitar 90%.

Dalam tanda nyata upaya AS untuk meningkatkan hubungan dengan Rusia, Menteri Luar Negeri Marco Rubio berbicara pada hari Sabtu dengan Menteri Luar Negeri Rusia Sergei Lavrov untuk memberitahunya tentang serangan AS di Yaman, kata Departemen Luar Negeri.

"Menlu memberi tahu Rusia tentang operasi pencegahan oleh militer AS terhadap kelompok Houthi yang didukung Iran, dan menekankan bahwa serangan Houthi yang berlanjut terhadap kapal militer AS dan kapal komersial AS di Laut Merah tidak akan ditoleransi," kata juru bicara Deplu AS Tammy Bruce dalam pernyataannya.

Rusia mengandalkan persenjataan yang disediakan Iran dalam perangnya di Ukraina, termasuk rudal dan drone, kata pejabat AS dan Ukraina. (Reuters, Anadolu, Antara, ist/nei)



Orang-orang berkumpul di lokasi rumah yang terkena serangan AS di Saada, Yaman, Minggu (16/3/2025). (Reuters)

Akar Bajakah Obat Alami Atasi Obesitas hingga Diabetes

TANAMAN kayu bajakah kini menjadi perhatian utama di bidang kesehatan, terutama setelah penelitian tahun 2019 yang memenangkan medali emas di World Invention Creativity Olympic di Korea Selatan oleh tiga pelajar Indonesia. Hasil penelitian tersebut menunjukkan bahwa akar bajakah memiliki kandungan berbagai senyawa penting. Misalnya seperti fenolik, flavonoid, saponin, dan tanin.

Akar tanaman yang biasa dikonsumsi dengan cara direbus ini, dipercaya dapat memberikan banyak manfaat bagi kesehatan tubuh.

Ketahui Fakta Kayu Bajakah untuk Kanker

Kayu bajakah menjadi perhatian besar di dunia kesehatan setelah tiga pelajar Indonesia membuktikan potensinya dalam melawan kanker pada tikus putih di ajang World Invention Creativity Olympic 2019.

Penelitian tersebut menunjukkan bahwa kayu bajakah mengandung senyawa alami seperti flavonoid, saponin, dan tanin yang dikenal memiliki sifat antikanker.

Namun, penting untuk dipahami bahwa penelitian mengenai efektivitas kayu bajakah untuk kanker pada manusia masih sangat terbatas.

Menurut Kementerian Kesehatan Indonesia, klaim tentang kemampuan kayu bajakah untuk menyembuhkan kanker belum didukung uji klinis pada manusia. Studi awal pada tikus memberikan hasil positif, proses ilmiah tetap harus melalui serangkaian uji klinis pada manusia guna memastikan keamanan, keefektifan, serta jenis kanker yang mungkin bisa ditargetkan.

Selain itu, National Cancer Institute juga memaparkan bahwa senyawa flavonoid memang dikenal memiliki sifat antioksidan yang

kuat, yang dapat membantu melindungi tubuh dari **Kerusakan sel akibat radikal bebas**.

Akan tetapi, belum terdapat bukti langsung bahwa flavonoid atau saponin dari kayu bajakah efektif melawan kanker manusia.

Manfaat Akar Bajakah Bagi Kesehatan

Berdasarkan kandungan senyawa penting pada akar bajakah, berikut ini adalah beberapa manfaat kesehatan yang dapat diperoleh, antara lain:

Mencegah Obesitas

Sebuah studi yang dipublikasikan dalam jurnal *Neurologico Spinale Medico Chirurgico* menunjukkan bahwa konsumsi ekstrak kayu bajakah tawala efektif untuk menurunkan kadar Reactive Oxygen Species (ROS) pada tikus yang mengalami obesitas.

Perlu diketahui bahwa ROS berfungsi sebagai molekul yang memberi sinyal pada sel untuk melakukan proses biologis normal. Kadar ROS yang tinggi juga berkaitan erat dengan obesitas. Selain itu, ekstrak kayu bajakah juga dapat menurunkan berat lemak visceral atau lemak aktif secara efektif.

Mempercepat Penyembuhan Luka

Salah satu manfaat akar bajakah bagi kesehatan adalah **m e m p e r c e p a t p r o s e s p e n y e m b u h a n luka**. Akar bajakah

mengandung senyawa metabolit sekunder seperti flavonoid, tanin, saponin, dan fenol.

Nah, kandungan senyawa tanin berfungsi untuk menghilangkan mikroba berbahaya dari tubuh. Selain itu, kandungan tanin juga dapat melawan bakteri, virus, dan jamur berbahaya dengan cara mempercepat pembekuan darah. Maka dari itu, proses penyembuhan pada luka pun dapat berjalan lebih cepat.

Mencegah Risiko Diabetes

Dilansir dari WebMD, sejumlah penelitian telah menunjukkan banyak sekali manfaat dari senyawa flavonoid. Salah satunya adalah mencegah penyakit seperti diabetes melitus. Nah, kandungan flavonoid pada akar bajakah dipercaya dapat mencegah diabetes dan komplikasinya.

Meski begitu, ada baiknya untuk mengonsumsi obat diabetes yang diresepkan dan mendiskusikannya terlebih dahulu dengan dokter sebelum mengonsumsi akar bajakah.

Mencegah Berbagai Penyakit Kronis Lainnya

Selain mencegah diabetes, kandungan senyawa flavonoid juga dapat mencegah berbagai penyakit kronis. Sebab, flavonoid akan membantu

tubuh mengatur aktivitas sel dan melawan radikal bebas yang dapat menimbulkan stres oksidatif pada tubuh.

Secara sederhana, flavonoid dapat melindungi tubuh dari racun dan stres sehari-hari, sehingga dapat membuat fungsi tubuh berjalan lebih optimal. Flavonoid juga merupakan antioksidan yang kuat, dan dapat mencegah berbagai risiko penyakit kardiovaskular, kanker, diabetes, dan penyakit kognitif seperti alzheimer dan demensia.

Menurunkan Risiko Penyakit Hati

Merujuk dari penelitian yang terbit pada *The Journal Of Tropical Life Science*, akar bajakah dipercaya memiliki kandungan antioksidan yang cukup untuk mencegah kerusakan hati. Maka dari itu, salah satu cara menurunkan risiko penyakit hati adalah mengonsumsi akar bajakah.

Namun, hal ini masih diperlukan penelitian yang lebih dalam terkait efektivitas akar bajakah dalam mencegah penyakit liver. Nah, itulah beberapa manfaat yang dapat diperoleh dari mengonsumsi ekstrak akar bajakah. Mulai dari mencegah obesitas, mempercepat penyembuhan luka, mencegah risiko diabetes, mencegah berbagai risiko kronis, hingga menurunkan risiko penyakit hati. (nei.ist/dya)

Eksperimen Unik Ilmuwan Tempel "Gen Bahasa" ke Tikus

SEBUAH tim peneliti melakukan eksperimen inovatif dengan menyisipkan "gen bahasa" manusia ke dalam genetik tikus. Hasilnya, perubahan genetik tersebut ber-dampak signifikan pada kemampuan tikus untuk mengeluarkan suara, memberikan wawasan baru tentang bagaimana komunikasi vokal berkembang.

Anak tikus yang memiliki gen bahasa versi manusia menunjukkan pola vokalisasi yang berbeda dengan tikus lain yang tidak memiliki gen tersebut. Saat memanggil induknya, suara mencicit mereka lebih tinggi dan memiliki pilihan suara yang berbeda dari biasanya.

"Semua bayi tikus mengeluarkan bunyi mencicit ultrasonik kepada induknya, dan peneliti bahasa mengkategorikan bunyi mencicit yang berbeda-beda ini menjadi empat huruf-S, D, U, dan M," kata Robert B Darnell, penulis studi dan kepala Laboratorium Neuro-Onkologi Molekuler di Rockefeller University, seperti dikutip IFLScience.

"Kami menemukan bahwa ketika kami 'mentransliterasikan' bunyi mencicit yang dibuat oleh tikus dengan varian [gen bahasa] khusus manusia, bunyi tersebut berbeda dari bunyi mencicit yang dibuat oleh tikus liar. Beberapa huruf telah berubah."

Tikus yang dimodifikasi secara genetika menunjukkan perubahan yang lebih menarik ketika dewasa. Saat mencoba merayu calon pasangan,

tikus jantan mengeluarkan suara frekuensi tinggi yang lebih kompleks daripada tikus liar.

"Mereka 'berbicara' secara berbeda dengan tikus betina. Kita bisa bayangkan bagaimana perubahan vokalisasi tersebut dapat berdampak besar pada evolusi," jelas Darnell.

Semua perubahan ini dikaitkan dengan pergeseran gen disebut *Nova1*, yang mengkode protein antigen ventral neuro-onkologis1 (*NOVA1*). Gen lain, serta faktor lingkungan, kemungkinan dikaitkan dengan munculnya komunikasi vokal yang kompleks. Namun, *NOVA1* tampaknya merupakan unsur penting dalam campuran tersebut.

Gen ini ditemukan di berbagai jenis

hewan, mulai dari burung hingga mamalia. Di manusia, gen ini muncul secara berbeda. Varian manusia menghasilkan perubahan asam amino tunggal, dari isoleusin menjadi valin, pada posisi 197 (I197V) dalam rantai protein *NOVA1*.

Para peneliti pertama kali menemukan varian *NOVA1* khusus manusia tidak mengubah cara protein mengikat RNA untuk perkembangan otak atau kontrol gerakan. Dengan kata lain, ia bekerja seperti versi tikus asli.

Namun, mereka menemukan sesuatu yang tidak terduga: Varian *NOVA1* manusia memengaruhi pengikat RNA pada gen terkait dengan vokalisasi.

"Selain itu, banyak dari gen terkait vokalisasi ini juga ditemukan menjadi target pengikatan *NOVA1*, yang selanjutnya menunjukkan keterlibatan *NOVA1* dalam vokalisasi," kata Yoko Tajima, penulis studi pertama dan rekan pascadoktoral di lab Darnell. "Kami pikir, wow. Kami tidak menyangka itu. Itu adalah salah satu momen yang sangat mengejutkan dalam sains."

Yang lebih mengejutkan lagi, kerabat terdekat manusia, Neanderthal dan Denisova, tidak memiliki varian manusia yang sama seperti kita miliki. Mereka hanya memiliki protein *NOVA1* yang sama seperti hewan.

"Data kami menunjukkan bahwa populasi leluhur manusia modern di Afrika mengembangkan varian manusia I197V, yang kemudian menjadi dominan, mungkin karena memberikan keuntungan terkait komunikasi vokal. Populasi ini kemudian meninggalkan Afrika dan menyebar ke seluruh dunia," ujar Darnell.

Apakah ini berarti sepupu hominin kita yang telah punah tidak memiliki peralatan genetik untuk berbicara sefasih *Homo sapiens*? Jika demikian, mungkinkah ini merupakan keuntungan utama yang memungkinkan spesies kita berkembang sementara spesies lain punah?

Studi terbaru di jurnal *Nature Communications* ini tampaknya menunjukkan demikian, meski tidak diragukan lagi ada lebih banyak hal di balik kisah tersebut. (nei,ist/dya)



HARIAN
LENERA
Inspirasi Perubahan **TODAY**

HARIAN "LENERA TODAY"
PIMPINAN PERUSAHAAN TARMUJI TALMACSI
OMBUDSMAN SUKARJITO (ID Sertifikasi 14319)
PENANGGUNG JAWAB ARIFIN B.H (ID Sertifikasi 13043)
PIMPINAN REDAKSI ARIFIN B.H (ID Sertifikasi 13043)
REDAKTUR PELAKSANA AGUSTINA WIDYAWATI (ID Sertifikasi 2567)
REDAKTUR LUTFIYU HANDI, NEISKA OLIVIANA (CO)

KORAN DIGITAL LENTERA TODAY
Terbit Senin - Jumat (12 Halaman)
download edisi digital pada web
www.lenteratoday.com
VERIFIKASI FAKTUAL DEWAN PERS
803/DP-Verifikasi/K/X/2021



MEDIA TERVERIFIKASI

BIRO: SURABAYA: YOLANDA APRILLIA PRADITHA, AMANAH NUR ASIAH, JOKO PRASETYO | **GRESIK:** ASEPTA YOGA P. (SERTIFIKASI WARTAWAN UTAMA) | **MOJOKERTO:** NUR HIDAYAH | **LAMONGAN:** L HANDI | **BLITAR:** ARIEF SUKAPUTRA | **KEDIRI:** GATOT SUNARKO | **JOMBANG:** SUTONO | **PASURUAN-PROBOLINGGO-PONOROGO:** IMAN SANTOSO | **BONDOWOSO- SITUBONDO-LUMAJANG-JEMBER-BANYUWANGI:** PURCAHYONO JULIATMOKO | **MADIUN:** WIWIET EKO PRASETYO (SERTIFIKASI WARTAWAN MUDA) | **MALANG RAYA:** SANTI WAHYU SANIA (SERTIFIKASI WARTAWAN MUDA), ISKANDAR Z. | **MADURA RAYA:** SAHLAN KURNIAWAN | **TRENGGALEK:** TINA W | **NGAWI:** DIMAS RIDHO SURYO BASKORO | **DKI JAKARTA:** FUAD HASSAN | **LOMBOK BARAT:** MUHAYYAN | **PALANGKA RAYA:** NOVITA MASNIARI

PENASEHAT HUKUM DR. NURIYANTO A. DAIM, SH, MH | **MARKETING COMMUNICATION** JOKO PRASETYO UTOMO, ISKANDAR ZULKARNAIN | **SEKERTARIS** FITRIYANTI SUTAN, FARADITA NUR FADHILAH
DESAIN GRAFIS PAULUS IVAN | **ALAMAT REDAKSI** JL RUNGKUT ASRI UTARA VI/26 | **TELP** 03187854491 | **PENERBIT** PT MEDIA HEBAT INSPIRASI INDONESIA | **ALAMAT PERCETAKAN** SMILE GRAFIKA JL. RAYA KALIRUNGKUT 42 SURABAYA | **TELP IKLAN** 031-87854491 | **NIB** 91205006801134 | **HARGA IKLAN** RP 25.000 MM/KOLOM

Wartawan Lentera Today dalam setiap bertugas dilengkapi dengan tanda pengenal wartawan/kartu pers yang dikeluarkan perusahaan secara sah. Nama pemegang tanda pengenal wartawan/kartu pers Lentera Today tercantum di Box Redaksi. Siapa pun yang mengaku/mengatasnamakan Lentera Today, tanpa bisa menunjukkan surat/kartu tanda pengenal atau namanya tidak tercantum dalam Kotak Redaksi, agar ditolak/ dikonfirmasi/dilaporkan ke manajemen redaksi/perusahaan atau melalui nomor telepon yang tertera di Kotak Redaksi. Dalam melaksanakan tugas jurnalistik, setiap wartawan Lentera Today dilarang menerima dan/atau meminta apa pun dengan alasan apa pun.



Growth Mindset Kunci Sukses dalam Dunia Kerja

DALAM dunia kerja yang dinamis, kemampuan beradaptasi dan belajar secara terus-menerus sangatlah krusial. Memiliki growth mindset merupakan salah satu kunci untuk membantu Anda beradaptasi dan berkembang dalam lingkungan kerja yang terus berubah.

Individu dengan mindset tetap percaya bahwa bakat dan kemampuan adalah sifat tetap yang tidak dapat diubah. Ini adalah pola pemikiran all-or-none - kamu harus memilikinya atau tidak. Sebaliknya, orang dengan mindset berkembang percaya bahwa bakat dan kemampuan dapat dikembangkan - melalui usaha dan kerja keras.

Berbeda dengan fixed mindset, percaya akan kemampuan dan kecerdasan seseorang adalah hal tetap. Sementara itu, growth mindset memfokuskan pentingnya usaha dan pembelajaran sebagai kunci utama dalam meraih kesuksesan. Lantas, seperti apa peran penting growth mindset dalam dunia pekerjaan?

Meningkatkan kemampuan beradaptasi dengan perubahan

Salah satu tantangan terbesar dalam dunia kerja modern adalah perubahan yang semakin cepat. Mulai dari teknologi baru hingga tren industri yang selalu berubah, menuntut para pekerja untuk selalu siap beradaptasi. Seseorang dengan growth mindset cenderung lebih terbuka pada perubahan. Sebab,

mereka melihat perubahan sebagai peluang untuk berkembang. Pola pikir ini sangat memungkinkan bagi seseorang dalam menerima tantangan baru dengan lebih percaya diri. Dengan growth mindset, kamu tak hanya berusaha menyesuaikan diri dengan perubahan, tetapi juga mencari cara untuk belajar dan m e m a n f a t k a n n y a u n t u k meningkatkan kemampuan diri.

Mendorong pemikiran yang inovatif dan kreatif

Dalam dunia pekerjaan, terutama di industri yang sangat kompetitif, inovasi menjadi kunci untuk bertahan dan berkembang. Growth mindset berperan sangat penting untuk mendorong kreativitas dan inovasi di tempat kerja.

Jika kamu memiliki pola pikir berkembang, maka akan lebih terbuka untuk mencoba dan mengeksplorasi berbagai ide baru, hingga bertahan terhadap kegagalan.

Salah satu aspek penting dari growth mindset adalah kemampuan melihat kegagalan sebagai proses pembelajaran.

Saat mengalami kegagalan, alih-alih menyalahkan diri sendiri, akan lebih baik menganggapnya sebagai pengalaman berharga untuk memperbaiki diri.

Seseorang yang memiliki growth mindset, lebih cenderung untuk berbagi ide tanpa rasa takut akan penilaian atau kegagalan.

Membangun kolaborasi dan bekerja secara tim

Tidak ada pekerjaan yang benar-benar dilakukan seorang diri. Kerja dalam tim menjadi bagian penting dalam setiap perusahaan. Untuk bekerja dengan baik dalam tim, membutuhkan komunikasi yang efektif, keterbukaan, dan kemampuan untuk menerima pendapat orang lain.

Seseorang dengan growth mindset akan lebih menghargai untuk belajar dari rekan kerja, terlepas dari posisi atau pengalaman yang dimiliki orang tersebut. Alih-alih merasa terancam, mereka melihatnya sebagai kesempatan untuk berkembang.

Hal ini dapat mendukung dan memberi inspirasi pada rekan tim, yang membuat peningkatan pada kualitas kerja tim secara keseluruhan. Selain itu, ketika sebuah tim menghadapi kesulitan, seseorang dengan growth mindset tidak akan cepat menyerah atau mencari siapa yang salah.

Kemampuan pengambilan keputusan

Keputusan yang baik adalah kunci kesuksesan dalam dunia kerja. Setiap harinya, kita dihadapi berbagai keputusan yang dapat memengaruhi pekerjaan kita. Mulai dari bagaimana mengatur prioritas, memilih proyek yang dikerjakan, hingga memutuskan cara terbaik untuk menyelesaikan pekerjaan. Seseorang yang menguasai growth mindset, memiliki kemampuan

pengambilan keputusan yang lebih baik. Hal ini didasari atas experience atau knowledge yang dimiliki, namun terbuka juga untuk belajar dari berbagai pendapat.

Pola pikir tersebut dapat membantu kamu untuk tidak takut membuat kesalahan. Dengan growth mindset, kamu mampu mengevaluasi situasi secara objektif dan memahami kesalahan sebagai proses pembelajaran

Memperkuat keterampilan dan pengembangan karier

Perkembangan keterampilan agar tetap kompetitif dalam dunia pekerjaan, menjadi hal penting. Salah satu keuntungan utama dari growth mindset adalah kemampuan dalam mendorong seseorang untuk terus belajar dan meningkatkan keterampilan.

Apabila seseorang menerapkan growth mindset, mereka tidak merasa puas dengan pencapaian saat ini. Mereka selalu mencari cara untuk menambah pengetahuan, baik melalui pelatihan formal, pengalaman kerja, atau pembelajaran secara mandiri.

Seseorang dengan growth mindset akan lebih termotivasi untuk mempelajari keterampilan baru, atau mencoba peran lainnya yang lebih menantang. Pola pikir ini juga membuat seseorang untuk tetap berpikir dengan jernih, meskipun dihadapi rintangan atau kegagalan. (nei,ist/dya)

Friksi Tajam ... (dari Hal 1)

PANITIA kerja (Panja) Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang TNI (RUU TNI) akan melanjutkan pembahasan kembali sejumlah perubahan dalam revisi UU TNI di Gedung DPR RI, Jakarta, Senin (17/3/2025)..

Sebelumnya sorotan tajam diberikan karena pembahasan berlangsung di Hotel Fairmont Jakarta pada akhir pekan, 14-15 Maret 2025.

Koalisi Masyarakat Sipil untuk Reformasi Sektor Keamanan, yang terdiri dari 20 kelompok masyarakat sipil, menyatakan bahwa pembahasan RUU TNI berpotensi menghidupkan kembali dwifungsi ABRI.

Direktur Imparsial Ardi Manto Adiputra menilai, "Perluasan penempatan prajurit TNI aktif di jabatan sipil berpotensi melemahkan profesionalisme militer dan mengancam supremasi sipil." Pernyataan ini disampaikan Ardi dalam keterangan tertulis dikutip Minggu (16/3/2025).

Salah satu poin kontroversial dalam RUU TNI adalah perubahan pada Pasal 47. Dalam UU No. 34 Tahun 2004, Pasal 47 ayat (1) menyatakan bahwa prajurit hanya dapat menduduki jabatan sipil setelah mengundurkan diri atau pensiun dari dinas aktif.

Namun, dalam RUU TNI terbaru, ketentuan ini diubah menjadi prajurit aktif dapat menduduki jabatan di kementerian dan lembaga negara, termasuk kantor yang membidangi politik dan keamanan negara, pertahanan negara, sekretaris militer presiden, intelijen negara, sandi negara, Lembaga Ketahanan Nasional (Lemhannas), Dewan Pertahanan Nasional, Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan (SAR), Badan Narkotika Nasional (BNN), dan Mahkamah Agung.

Mengutip RUU TNI, Pasal 47 ayat (2) menyebutkan, "Prajurit aktif dapat menduduki jabatan pada kementerian/lembaga lain yang membutuhkan tenaga dan keahlian Prajurit aktif sesuai dengan kebijakan Presiden."

Dalam konteks ini, Ardi memperingatkan bahwa kebijakan ini membuka ruang bagi militer untuk kembali terlibat dalam jabatan-jabatan sipil strategis, yang mengingatkan pada era dwifungsi ABRI di masa Orde Baru.

Selain itu, dalam Pasal 53 RUU TNI terbaru, usia pensiun perwira yang sebelumnya 58 tahun diubah menjadi 60 tahun. Bahkan, untuk jabatan fungsional tertentu, usia pensiun bisa diperpanjang hingga 65 tahun. Perwira tinggi bintang empat juga dapat diperpanjang masa dinas hingga dua kali dengan keputusan Presiden.

Mengutip Amnesty International Indonesia pada Kamis, 13 Maret 2025,

RUU TNI dianggap sebagai upaya untuk mengembalikan dwifungsi ABRI yang pernah berlaku di masa Orde Baru. Amnesty menyebutkan bahwa perubahan dalam RUU TNI tidak hanya memungkinkan prajurit TNI aktif menduduki jabatan di kementerian dan lembaga negara, tetapi juga membuka ruang bagi militer untuk terlibat dalam penegakan hukum dan operasi militer selain perang.

"Perluasan di jabatan sipil yang menambah Kejaksaan Agung dan Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) jelas merupakan bentuk dwifungsi TNI. Tugas militer seharusnya fokus pada pertahanan negara, bukan terlibat dalam proses hukum atau pengelolaan sektor perikanan," ungkap pernyataan Amnesty.

Amnesty juga menyoroti peran Jampidmil (Jaksa Agung Muda Pidana Militer) yang diatur dalam RUU TNI. Menurut Amnesty, pembentukan posisi ini hanya akan memperkuat impunitas di kalangan militer karena memungkinkan perwira aktif tetap menjabat dalam struktur hukum sipil tanpa konsekuensi.

Selain itu, pelibatan TNI dalam penanganan narkoba juga menjadi sorotan. Amnesty menilai pelibatan militer dalam isu narkoba akan membuat pendekatan penanganan masalah ini bergeser dari ranah penegakan hukum ke ranah operasi militer.

"Jika ingin merevisi UU TNI justru seharusnya 10 jabatan sipil yang diatur dalam pasal 47 ayat (2) UU TNI dikurangi bukan malah ditambah," tulis Amnesty.

RUU TNI ini masih dalam tahap pembahasan di DPR dan berpotensi disahkan sebelum masa reses pada 20 Maret 2025. Jika disahkan, regulasi ini dapat membuka kembali peran militer dalam ranah politik dan pemerintahan, yang menjadi salah satu karakteristik utama dwifungsi ABRI di masa Orde Baru.

Koalisi dosen yang tergabung dalam beberapa organisasi masyarakat sipil menyatakan penolakan terhadap revisi Undang-Undang Tentara Nasional Indonesia atau revisi UU TNI. Alasannya, ada kekhawatiran RUU tersebut melanggar Hak Asasi Manusia hingga kebebasan akademik.

Para dosen mewakili organisasi Constitutional and Administrative Law Society (CALs), Kaukus Indonesia untuk Kebebasan Akademik (KIKa), Pusat Studi Hukum dan Kebijakan (PSHK) Indonesia, dan Serikat Pekerja Kampus (SPK).

Koordinator KIKa, Satria Unggul Wicaksana Prakasa, menilai revisi UU TNI yang sedang bergulir di DPR bersifat inkonstitusional, melanggar hak asasi manusia, hingga kebebasan akademik. "Ketika impunitas yang dimiliki oleh TNI ini kemudian semakin menguat, ini juga dampaknya sangat luar biasa

terhadap kehidupan kampus," kata Satria dalam pernyataan bersama para dosen yang tayang di kanal YouTube KIKa pada Ahad, 16 Maret 2025.

Dosen Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Surabaya itu khawatir TNI nantinya memiliki kekuatan untuk memberangus kebebasan akademik. Salah satu kecemasan yang ia sebutkan adalah TNI dapat melakukan sweeping atau operasi penertiban atas buku-buku yang bertentangan dengan ideologi Pancasila.

"Atau juga dapat membubarkan diskusi di kampus jika dianggap bertentangan dengan prinsip keamanan nasional," katanya.

KIKa, CALs, PSHK Indonesia, dan SPK pun menilai impunitas TNI dapat berpengaruh secara langsung maupun tidak langsung terhadap situasi kebebasan akademik di Indonesia.

"Dampak impunitas juga menjadikan serangan yang sistematis terhadap insan akademik, melalui sweeping buku-buku kiri, pembubaran diskusi berkaitan isu Papua dan keamanan nasional, serta berbagai tindakan represi lainnya menjadikan situasi kebebasan akademik semakin memprihatinkan," kata koalisi tersebut dalam pernyataan sikap bersama.

Selain kebebasan akademik, keempat organisasi tersebut juga berpandangan revisi UU TNI melemahkan profesionalisme militer serta berisiko mengembalikan dwifungsi militer seperti di masa Orde Baru

PBNU Ikut Kritik

Teroisah, Ketua Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) Mohamad Syafi' Alielha (Savic Ali) menilai tak masuk akal jika prajurit aktif TNI bisa berdinasi di Kejaksaan Agung (Kejagung) dan Mahkamah Agung (MA).

Ia juga menyayangkan pembahasan RUU TNI dilakukan terburu-buru dan tertutup di Fairmont Hotel, Jakarta, pada Sabtu (15/3/2025).

"Saya kira itu tidak masuk akal bahwa Kejaksaan Agung dan Mahkamah Agung butuh kompetensi hukum yang sangat tinggi dan TNI tidak dididik untuk ke sana," kata Savic dalam keterangannya di laman resmi NU.

Savic menimbang personel TNI aktif masih bisa diterima jika masuk ke Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan (SAR Nasional) dan Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB).

Savic menganggap masuknya TNI ke MA dan Jaksa Agung memberikan implikasi negatif terhadap terlaksananya pemerintahan yang baik.

"Tapi saya kira itu adalah kemunduran dari semangat good governance, pemerintahan yang bersih, pemerintahan yang demokratis dan bertentangan dengan

spirit reformasi tahun 98," ucap dia.

Terpisah, Direktur Wahid Foundation Zannuba Arifah Chafsoh (Yenny Wahid) pun berharap TNI bisa fokus dalam urusan pertahanan negara. Menurutnya, TNI tak perlu masuk ke ruang-ruang sipil dan politik.

"Karena itu bisa membawa kerancuan dalam kualitas berdemokrasi kita," kata Yenny.

Yenny menekankan jika TNI masuk dan menduduki jabatan sipil, maka harus menanggalkan baju dinas keprajuritan. Komitmen tersebut harus tertanam dan tersadarkan di setiap individu anggota TNI.

"Kita minta klarifikasi kok ada standar-standar yang berbeda untuk jabatan sipil dengan jabatan-jabatan yang dimiliki oleh TNI, mana jabatan yang membuat seseorang dapat menanggalkan posisinya sebagai anggota TNI aktif dan mana yang harus dipertahankan, ini yang harus saya rasa sebagai masyarakat sipil harus dikritisi," ucap dia.

Senin Dilanjutkan di Senayan

Panitia kerja (Panja) Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang TNI (RUU TNI) akan melanjutkan pembahasan kembali sejumlah perubahan dalam revisi UU TNI di Gedung DPR RI, Jakarta, Senin (17/3/2025).

"Senin akan dibahas kembali di parlemen," kata Amelia Anggraini anggota Komisi I DPR RI di Jakarta, Minggu (16/3/2025).

Hal itu disampaikan usai Panja RUU TNI Komisi I DPR bersama Pemerintah melakukan konsinyering di salah satu hotel mewah di kawasan Senayan, Jakarta, Jumat-Sabtu (14-15/3/2025) kemarin.

"Pembahasan panja ini masih akan berlangsung sebagai bagian dari proses legislasi, beberapa poin memang masih dalam pendalaman-pendalaman frasa-frasa dan substansinya," ucapnya.

Dia pun menekankan bahwa pembahasan RUU TNI mengedepankan prinsip supremasi sipil dalam menampung aspirasi masyarakat atas revisi UU tersebut.

"UU ini mengedepankan supremasi sipil, DPR dan Pemerintah sangat akomodatif menampung aspirasi masyarakat, sehingga sesungguhnya tidak harus ada yang dikhawatirkan oleh masyarakat," ujarnya.

"Kami juga sangat menjaga kepercayaan publik yang sudah baik selama ini terhadap TNI," lanjutnya.

Sebelumnya, Sabtu (15/3/2025), anggota Komisi I DPR RI TB Hasanuddin mengatakan Panja RUU TNI telah merampungkan pembahasan 40 persen dari 92 Daftar Inventarisasi Masalah (DIM) RUU TNI sejak, Jumat (14/3/2025). (din, wid, tmo, ant, rls, ist/dya)



Komisi C DPRD Jatim Matangkan Raperda BUMD Dorong Transparansi dan Optimalisasi PAD



Rapat dengar Pendapat DPRD Jatim bersama Biro Hukum Pemprov Jawa Timur

SURABAYA – Komisi C DPRD Jawa Timur terus mematangkan pembahasan Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Badan Usaha Milik Daerah (BUMD). Untuk memperkuat regulasi dan memastikan efektivitas pengelolaan BUMD, Komisi C menghadirkan Biro Hukum Pemprov Jawa Timur dalam rapat dengar pendapat yang digelar di Hotel Aston Sidoarjo, Jumat (14/3/2025).

Dalam rapat tersebut, berbagai persoalan krusial terkait BUMD di Jawa Timur mengemuka. Mulai dari minimnya kontribusi beberapa BUMD terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) serta keterbatasan peran DPRD dalam proses seleksi jajaran direksi dan komisaris.

Anggota Komisi C DPRD Jawa Timur, Mirza Ananta, menyoroti lemahnya kontribusi sejumlah BUMD terhadap PAD Jawa Timur. Ia menegaskan perlunya pengawasan lebih ketat terhadap perusahaan daerah yang tidak memberikan manfaat optimal bagi keuangan daerah.

"Jawa Timur kehilangan PAD hampir Rp 4 triliun yang berasal dari bantuan pemerintah pusat. Ini seharusnya menjadi peringatan bagi kita semua untuk lebih selektif dan ketat dalam mengelola BUMD," ungkap Mirza.

Selain itu, politisi NasDem tersebut mengkritisi mekanisme pengangkatan

jajaran direksi dan komisaris di BUMD yang selama ini tidak melibatkan DPRD. Menurutnya, keterlibatan DPRD dalam proses seleksi ini sangat penting untuk memastikan individu yang ditunjuk memiliki kompetensi dan integritas dalam mengelola BUMD.

"Nyatanya, selama ini DPRD tidak pernah dilibatkan dalam proses dan mekanisme usulan jajaran direksi perusahaan daerah. Tapi ketika ada persoalan, DPRD justru diajak dalam pembahasan solusinya. Ini yang harus diperbaiki ke depan," tegasnya.

Sementara itu, anggota Komisi C DPRD Jawa Timur lainnya, Multazamudz Dzikri menyoroti sinkronisasi antara peraturan daerah (Perda), peraturan gubernur (Pergub), dan regulasi tingkat pusat terkait BUMD. Menurutnya, harmonisasi regulasi ini menjadi kunci agar DPRD bisa menjalankan fungsi pengawasan dengan lebih maksimal.

"Kita perlu memastikan bahwa payung hukum terkait BUMD ini sinkron dengan peraturan pemerintah (PP), perda, maupun pergub. Jangan sampai ada celah hukum yang membuat DPRD sulit menjalankan tugasnya dalam mengawasi kinerja BUMD," ujarnya.

Multazamudz, legislator asal PKB itu juga mendorong agar DPRD dilibatkan dalam seleksi jajaran direksi dan komisaris BUMD. Menurutnya, partisipasi DPRD dalam

proses seleksi ini bukan sekadar formalitas, tetapi sebagai bentuk pertanggungjawaban kepada rakyat yang diwakilinya.

"Harus ada keterlibatan DPRD, setidaknya sebagai bagian dari mekanisme check and balance agar orang-orang yang dipilih benar-benar memiliki kapasitas untuk memimpin BUMD," paparnya.

Lebih lanjut, ia menegaskan bahwa pengawasan terhadap BUMD harus menjadi prioritas DPRD Jatim ke depan. Dengan peran yang lebih aktif, DPRD bisa memastikan bahwa BUMD dikelola secara transparan dan mampu memberikan kontribusi yang lebih besar terhadap PAD.

Menanggapi berbagai persoalan terkait BUMD, Anggota Komisi C DPRD Jatim dari Fraksi PDI Perjuangan, Fuad Bernardi, menekankan pentingnya transparansi dan profesionalisme dalam pengelolaan BUMD. Ia menilai, tanpa transparansi, sulit bagi publik dan DPRD untuk mengawasi kinerja perusahaan daerah secara efektif.

"Transparansi harus menjadi prinsip utama dalam pengelolaan BUMD. Mulai dari seleksi direksi hingga laporan keuangan, semuanya harus bisa diakses dan diawasi oleh publik, termasuk DPRD. Jika kita ingin BUMD benar-benar berkontribusi terhadap PAD, maka tidak boleh ada ruang untuk praktik koruptif atau manajemen yang tidak profesional,"

tuturnya.

Fuad juga mengingatkan bahwa salah satu tantangan terbesar dalam pengelolaan BUMD adalah tata kelola yang belum sepenuhnya akuntabel. Ia menyoroti bagaimana beberapa BUMD mengalami kerugian bertahun-tahun tanpa adanya evaluasi yang jelas dari pemerintah daerah.

"Kita tidak boleh membiarkan BUMD yang terus rugi tanpa ada solusi nyata. Jika memang ada yang tidak efisien, harus ada evaluasi menyeluruh, termasuk kemungkinan restrukturisasi atau bahkan pembubaran jika memang tidak lagi layak dipertahankan," tegasnya.

Selain itu, Fuad menyoroti pentingnya inovasi dalam pengelolaan BUMD. Menurutnya, banyak BUMD yang masih mengandalkan model bisnis lama tanpa beradaptasi dengan perkembangan zaman.

"BUMD harus lebih inovatif dan adaptif terhadap perubahan. Jangan hanya mengandalkan pola bisnis konvensional, tetapi harus bisa melihat peluang baru, terutama dalam sektor digital dan energi terbarukan," tambahnya.

Dengan berbagai tantangan yang dihadapi BUMD, Komisi C DPRD Jatim berkomitmen untuk memperkuat fungsi pengawasannya. Selain mendorong transparansi dan profesionalisme, DPRD juga akan memastikan bahwa setiap BUMD memiliki rencana bisnis yang jelas dan berorientasi pada peningkatan PAD.

"Kami tidak ingin ada BUMD yang sekadar menjadi beban bagi keuangan daerah. Harus ada target yang jelas, baik dari segi keuntungan maupun kontribusi terhadap pembangunan daerah," pungkas Fuad Bernardi.

Pembahasan Raperda BUMD di Komisi C DPRD Jatim menegaskan perlunya reformasi dalam pengelolaan perusahaan daerah. Dengan dorongan dari DPRD, diharapkan BUMD dapat dikelola lebih transparan, profesional, dan berorientasi pada peningkatan PAD. (adv, pra/dya)